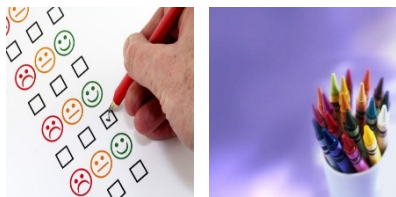


LAPORAN



HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

PERIODE TRIWULAN IV

TAHUN 2025



Pengadilan Agama Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta
Telp. 0274 - 552997

Website: www.pa-yogyakarta.go.id Email: admin@pa-yogyakarta.net

DAFTAR ISI

BAB I	1
KUESIONER SURVEI	1
1.1. DASAR HUKUM PELAKSANAAN SURVEI.....	1
1.2. KETENTUAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI	2
1.3. INDIKATOR SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI.....	2
BAB II	5
METODOLOGI SURVEI	5
2.1. KRITERIA RESPONDEN.....	5
2.2. METODOLOGI PENYUSUNAN SURVEY	5
2.3. METODOLOGI PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS	6
BAB III	8
PENGOLAHAN SURVEI	8
3.1. Analisis hasil survei.....	8
KESIMPULAN HASIL SURVEY.....	10
OPINI RESPONDEN	11
3.1. Tindaklanjuti hasil survei	12
BAB IV	13
DATA SURVEI	13
4.1. DATA RESPONDEN	13
RESPONDEN BERDASARKAN JENIS PELAYANAN	13
RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN	14
RESPONDEN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	14
RESPONDEN BERDASARKAN PEKERJAAN	16
4.2. DATA DUKUNG LAINNYA	18



LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN SURVEI
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN IV TAHUN 2025

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA KELAS I A

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Nomor 4 Tahun 2023

Yogyakarta, 19 Januari 2025

Ketua PA Yogyakarta

Ketua Tim

Dr. KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag., M.H.
197409261999032001

Drs. ABDUL ADHIM AT
196712281994031004

BAB I

KUESIONER SURVEI

1.1. DASAR HUKUM PELAKSANAAN SURVEI

Dasar hukum dari pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah.
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023

1.2. KETENTUAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan dan evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM, maka penyelenggaraan Survei Persepsi Anti Korupsi pada **Pengadilan Agama Yogyakarta** dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut

1. Survei dilakukan terhadap semua jenis layanan yang ada pada unit/satuan kerja yang melakukan pembangunan ZI
2. Survei dilakukan kepada seluruh penerima layanan yang telah selesai menerima pelayanan dari unit/satuan kerja
3. Pertanyaan survei minimal mencakup aspek integritas, tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan.
4. Pelaksanaan survei mandiri diutamakan memanfaatkan media berbasis digital sehingga memudahkan dalam pengolahan dan pelaporan hasil survei;
5. Proses survei sesuai dengan kaidah statistik dan metodologi yang diakui;
6. Hasil SPAK dalam skala 4 (empat) menjadi nilai dari komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel"
7. Survei mandiri yang dilakukan oleh unit/satuan kerja wajib menyertakan analisa dan rencana tindak lanjut perbaikan layanan.
8. Laporan hasil survey dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

1.3. INDIKATOR SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Indikator survey persepsi Anti Korupsi terdiri dari 5 yaitu aspek diskriminasi pelayanan, kecurangan pelayanan, permintaan imbalan, pungutan liar (pungli), dan percaloan/perantara. Adapun interval persepsi dari 5 indikator tersebut antara 1 sampai dengan 4 pada setiap pernyataan, dimana semakin banyak bintang menunjukkan bahwa Bapak/Ibu semakin setuju bahwa kualitas pelayanan pada unit layanan ini semakin baik.

Berikut pernyataan yang membentuk 5 indikator persepsi Anti Korupsi:

1. Aspek tidak adanya diskriminasi;

Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.

2. Aspek tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan;

Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda dan lain-lain.

3. Aspek tidak ada penerimaan imbalan;

Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi dll, di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan elektronik, pakaian, bahan pangan, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan, fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi dan hiburan/voucher belanja) di luar ketentuan.

4. Aspek tidak ada pungutan liar;

Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi.

5. Aspek Tidak ada Percaloan ;

Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktek percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum

pegawai pada unit pelayanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

BAB II

METODOLOGI SURVEI

2.1. KRITERIA RESPONDEN

Survei dilakukan terhadap semua jenis layanan yang ada pada **Pengadilan Agama Yogyakarta** dan penerima layanan yang telah selesai menerima pelayanan dari **Pengadilan Agama Yogyakarta**. Responden dipilih secara acak (*purposive sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah **Pengadilan Agama Yogyakarta**.

Berdasarkan Surat Edaran Plt. Ditjen Badilag Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 Tentang "Pemberlakuan Aplikasi E-Survey Simtalak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI". Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survey, jumlah minimal responden terpilih ditetapkan 95 responden selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober s/d Desember 2025

2.2. METODOLOGI PENYUSUNAN SURVEY

a. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di **Pengadilan Agama Yogyakarta** pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan **Pengadilan Agama Yogyakarta** pada tanggal 1 Oktober s/d 31 Desember 2025.

b. Penyusunan Jadwal

Jadwal survei dilaksanakan dari mulai Oktober sampai dengan Desember 2025 dan dilakukan analisis hasil survei dalam bulan Januari 2026.

c. Pengumpulan data

Pengumpulan data responden dilakukan melalui aplikasi survey badilag

(<https://survei.badilag.net/home/>) dan diperoleh sebanyak 188 responden.

Interval nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagai berikut:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SPAK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	B	Baik
4	3,53-4,00	A	Sangat baik

2.3. METODOLOGI PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

PENGOLAHAN DATA

Metode penelitian survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Sejalan dengan pernyataan tersebut, dalam penelitian survei informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner melalui online. Umumnya, pengertian survei dibatasi pada pengertian survei sampel di mana informasi dikumpulkan dari sebagian populasi (sampel) untuk mewakili seluruh populasi, minimal sampel 30 (tiga puluh) responden.

Pengisian kuesioner pada Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di lingkungan peradilan agama dilakukan melalui link <https://survei.badilag.net/home/>, pada link tersebut pengolahan data dilakukan secara otomatis dan hasil survey dapat diketahui secara real time. Pengolahan data responden disajikan dan dideskripsikan dalam bentuk table-tabel terdapat pada Bab IV data survey dan lampiran pada laporan ini.

ANALISIS DATA

Analisis data survei menggunakan analisis kuantitatif dengan menghitung jumlah keseluruhan jawaban responden pada masing-masing indikator dibandingkan dengan jumlah keseluruhan responden dikalikan jawaban maksimal. Hasil tersebut dikalikan dengan maksimal nilai pada interval 4,00. Adapun deskripsi perhitungannya sebagai berikut

$\sum X1$ = jumlah persepsi Indikator 1

n = jumlah data responden yang diolah

nilai maksimal persepsi (bobot) = 4

nilai maksimal survey (skala) = 4,00

$$\text{nilai survey } X1 = \frac{\sum X1}{n} \times 4,00$$

sebagai contoh: (lihat Bab IV pada data responden)

$$\text{nilai survey } X1 = \frac{371}{94} \times 4,00 = 3,91$$

Sedangkan nilai survey persepsi anti korupsi merupakan rata-rata dari nilai survey tiap indikator.

Dengan rumus =

$$\text{AVERAGE (Nilai Survey } X1 : X5)$$

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

3.1. ANALISIS HASIL SURVEI

Hasil penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Agama Yogyakarta pada **Tahun 2025 Periode Oktober s/d Desember** mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SPAK adalah **3,95 atau 98.75%**, jika dibandingkan dengan triwulan III Tahun 2025 sebesar **3,84** mengalami kenaikan sebesar **(0,11)**.

Faktor kenaikan

Berbagai indikator yang terkandung dalam kuisisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pemerintah yang bersih dan akuntabel, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Pada triwulan IV tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar (0,11) dikarenakan oleh meningkatnya pemahaman aparatur terhadap nilai-nilai integritas, penguatan komitmen anti korupsi, serta perbaikan berkelanjutan dalam sistem pelayanan dan pengawasan internal.

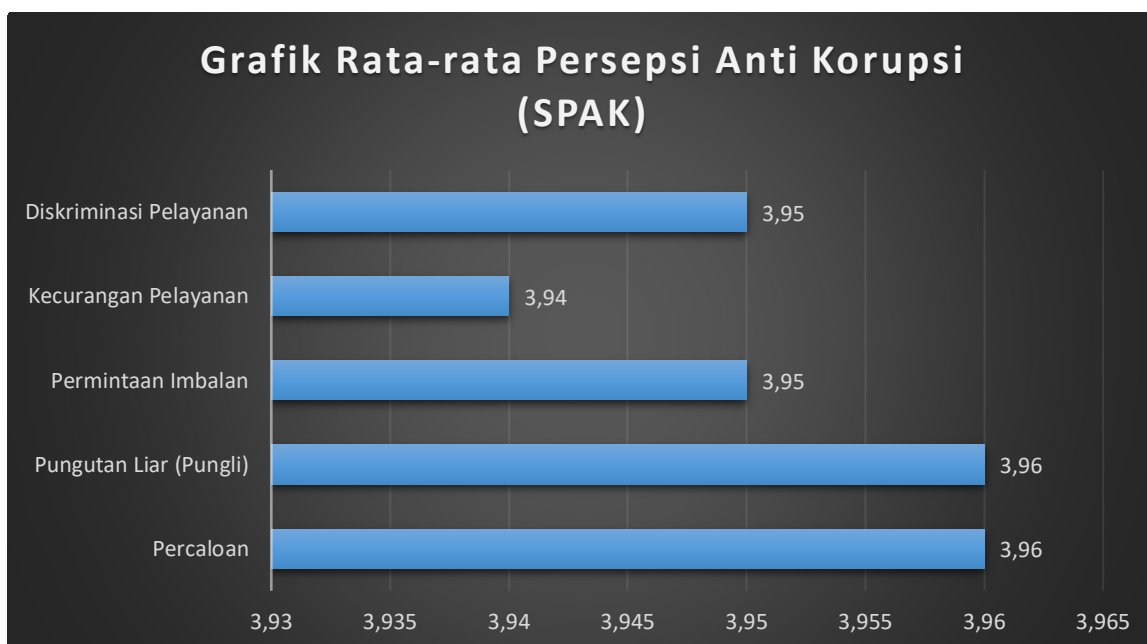
Tujuan survei persepsi anti korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi. Ada dua hal penting yang menjadi sasaran survey ini yaitu, Pertama adalah terselenggaranya pelayanan public yang bersih, akuntabel dan transparan. Kedua adalah tercapainya perbaikan system, mekanisme dan prosedur pelayanan public sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan anti gratifikasi.

**TABEL 3.1 NILAI RATA-RATA INDIKATOR PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

No.	Indikator Persepsi Anti Korupsi	Nilai Unsur	Mutu
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	3,95	Sangat Baik (A)
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	3,94	Sangat Baik (A)
3	Tidak ada permintaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	3,95	Sangat Baik (A)
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	3,96	Sangat Baik (A)
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini	3,96	Sangat Baik (A)
Rata-rata tertimbang		3,95	

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan, warna kuning paling rendah

**GRAFIK 3.1 NILAI RATA-RATA INDIKATOR PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA UNIT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**



Berdasarkan **Tabel 3.1** dan **Grafik 3.1** menunjukkan bahwa dari 5 Indikator sudah baik, Aspek anti korupsi yang dinilai masyarakat memiliki kualitas sangat baik adalah unsur **Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit pelayanan ini (3,96)** dan **Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini (3,96)** sedangkan unsur yang nilainya paling rendah yaitu unsur **Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan (3,94)**.

3.2. KESIMPULAN HASIL SURVEY

Berdasarkan hasil Analisa Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada **Pengadilan Agama Yogyakarta** tahun 2025 pada periode bulan Oktober s/d Desember, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

TABEL 3.2 KESIMPULAN HASIL SURVEY

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai SPAK	3,95
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Indikator Terendah	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan (3,94)
4.	Indikator Tertinggi	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit pelayanan ini dan Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini (3,96)

Jika dilihat dari perkembangan tiap triwulannya, hasil olah data survey sudah termasuk kategori sangat baik. Oleh karena **Pengadilan Agama Yogyakarta** sudah meraih Wilayah Bebas dari Korupsi dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sehingga perlu meningkatkan hasil survey persepsi anti korupsi dan persepsi kualitas pelayanan serta survei kepuasan masyarakat.

OPINI RESPONDEN

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat.

Berikut adalah masukan/opini/pendapat dari responden terhadap pelayanan **Pengadilan Agama Yogyakarta** :

- Tingkatkan terus pelayanan dan kenyamanan ruangan yang di luar
- Pelayanan cepat dan sarana sudah cukup baik

- Pelayanan sudah sesuai dan memuaskan
- Kinerjanya luar biasa sangat sangat membantu pelayanannya baik
- Lebih baik lagi dalam pelayanan untuk **Pengadilan Agama Yogyakarta** sukses selalu

3.1. TINDAKLANJUT HASIL SURVEI

Berdasarkan 3.2. kesimpulan hasil survey, nilai terendah pada unsur Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan (3,94) kategori sangat baik, secara keseluruhan hasil survey sudah sangat memuaskan sehingga yang perlu memelihara responden dengan meningkatkan pelayanan melalui penguatan kepatuhan terhadap prosedur, peningkatan integritas aparatur, serta perbaikan berkelanjutan pada sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel.

BAB IV DATA SURVEI

4.1. DATA RESPONDEN

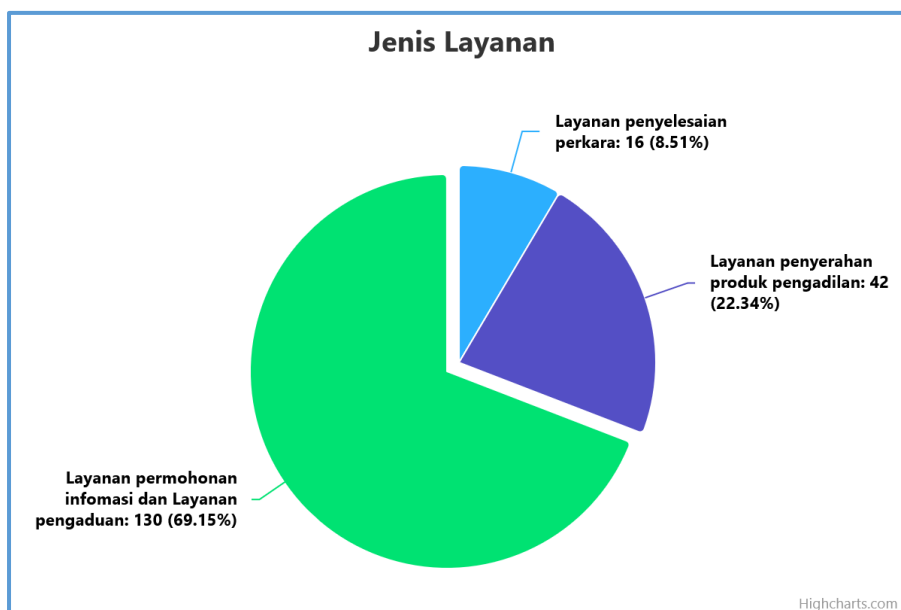
RESPONDEN BERDASARKAN JENIS PELAYANAN

Karakteristik responden pada survey periode bulan Oktober s/d Desember tahun 2025, sebagian besar responden melakukan layanan penyerahan produk yaitu sebesar 69,15% dari seluruh total 188 responden. Rincian responden yang tersurvei berdasarkan pengguna jenis pelayanan dapat dilihat pada **Tabel 4.1**

**TABEL 4.1 PERSENTASE RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
BERDASARKAN PENGGUNA JENIS PELAYANAN**

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase (%)
1	Layanan penyelesaian perkara	16	8,51%
2	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan	42	22,34%
3	Layanan penyerahan produk pengadilan	130	69,15%
Total		188	100%

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase terbesar pada pengguna jenis pelayanan

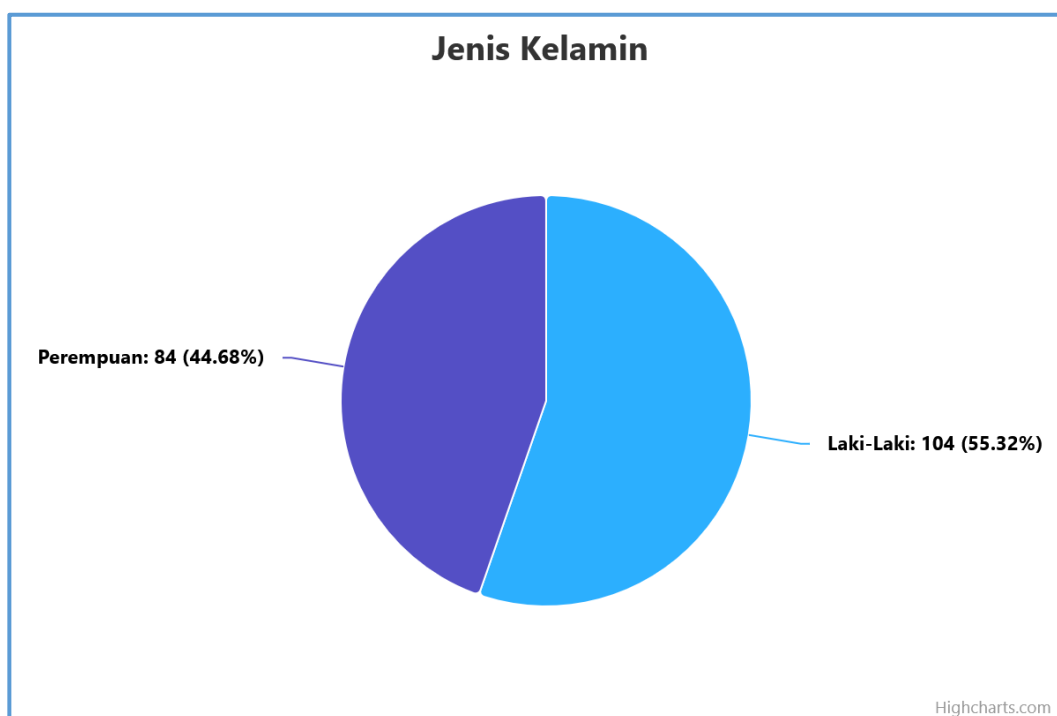


RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Karakteristik responden pada survey periode bulan Oktober s/d Desember tahun 2025, sebagian besar responden berjenis kelamin laki laki yaitu sebesar 55,32% dari seluruh total 188 responden. Rincian responden yang tersurvei berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada **Tabel 4.2**

**TABEL 4.2 PERSENTASE RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase (%)
1	Perempuan	84	44,68%
2	Laki-laki	104	55,32%
Total		188	100%

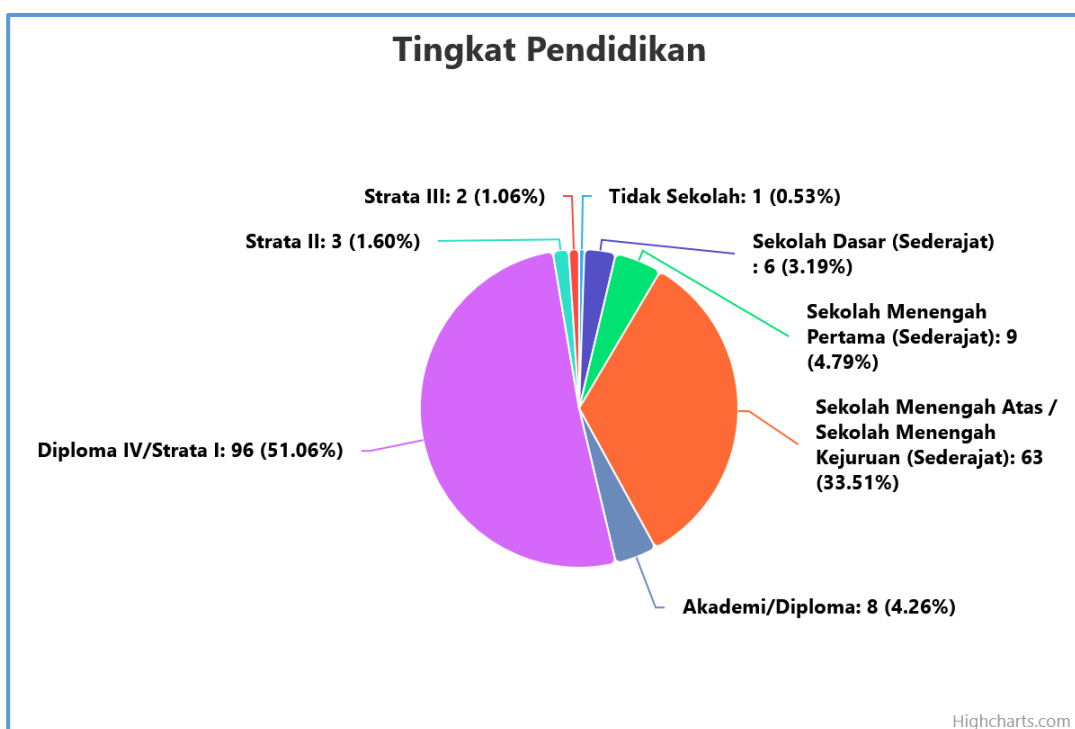


RESPONDEN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Karakteristik responden pada survey periode bulan Oktober s/d Desember tahun 2025, sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan Diploma IV/ Strata I yaitu sebesar 51,06% dari seluruh total 188 responden. Rincian responden yang tersurvei berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.3

**TABEL 4.3 PERSENTASE RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	1	0,53%
2	Sekolah Dasar (Sederajat)	6	3,19%
3	Sekolah Menengah Pertama (Sederajat)	9	4,79%
4	Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan (Sederajat)	63	33,51%
5	Akademi/Diploma	8	4,26%
6	Diploma IV/Strata I	96	51,06%
7	Strata II	3	1,60%
8	Strata III	2	1,06%
Total		188	100%

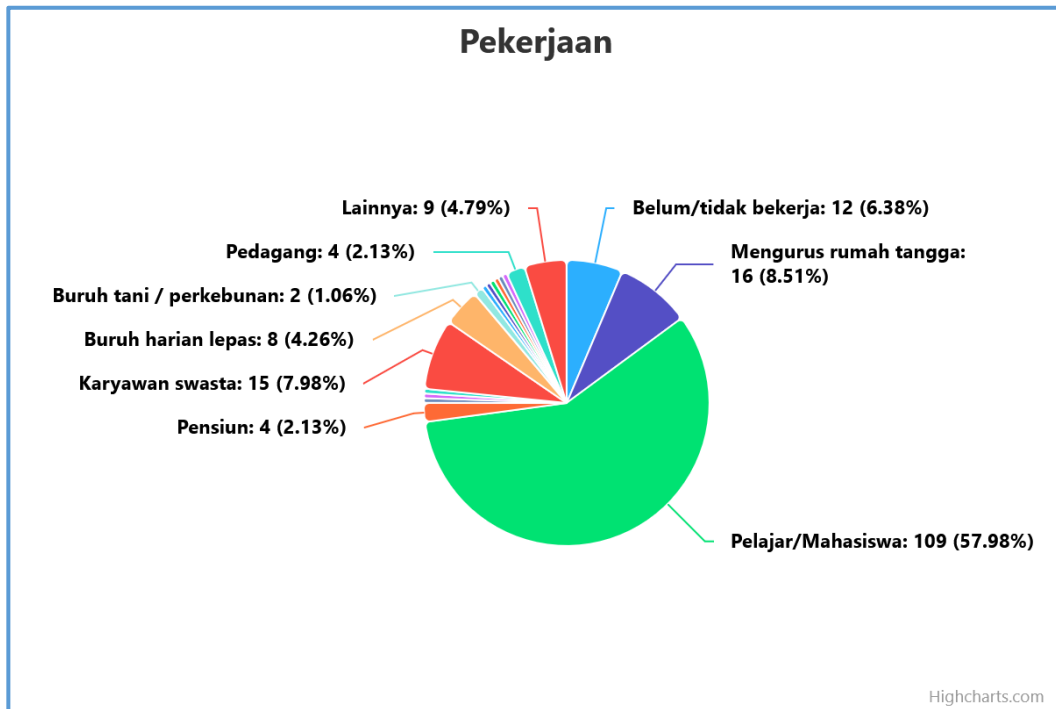


RESPONDEN BERDASARKAN PEKERJAAN

Karakteristik responden pada survey periode bulan Oktober s/d Desember tahun 2025, sebagian besar responden memiliki pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa sebesar 57,98% dari seluruh total 188 responden. Rincian responden yang tersurvei berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.3

**TABEL 4. PERSENTASE RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
BERDASARKAN PEKERJAAN**

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum/tidak bekerja	12	6,38%
2	Mengurus rumah tangga	16	8,51%
3	Pelajar/Mahasiswa	109	57,98%
4	Pensiun	4	2,13%
5	Pegawai Negeri Sipil	1	0,53%
6	Perdagangan	1	0,53%
7	Petani/pekebun	1	0,53%
8	Karyawan swasta	15	7,98%
9	Buruh harian lepas	8	4,26%
10	Buruh tani / perkebunan	2	1,06%
11	Seniman	1	0,53%
12	Promotor acara	1	0,53%
13	Walikota	1	0,53%
14	Anggota DPRD Kab/Kota	1	0,53%
15	Guru	1	0,53%
16	Pengacara	1	0,53%
17	Pedagang	4	2,13%
18	Pedagang	9	4,79%
Total		188	100%



Karakteristik responden yang mewakili pengunjung **Pengadilan Agama Yogyakarta** secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, **Pengadilan Agama Yogyakarta** dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

4.2. DATA DUKUNG LAINNYA

Laporan survey persepsi Anti Korupsi (SPAK) triwulan IV Tahun 2025 menurut hasil survey badilag sebagai berikut:

Satuan Kerja: PA YOGYAKARTA | Jenis Survei: Survei Persepsi Anti Korupsi

Jenis Periode: Per Triwulan | Tahun Periode: 2025 | Tahun Periode: Triwulan IV | [FILTER PERIODE](#)

DATA UNSURSURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
 Periode Triwulan 4 Tahun 2025
 Total Responden : 188 INDEKS : 3.95

[Copy](#) [CSV](#) [Excel](#) [Print](#)

NO	PERSEPSI ANTI KORUPSI	NILAI	MUTU
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	3.95	Sangat Baik (A)
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	3.94	Sangat Baik (A)
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	3.95	Sangat Baik (A)
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	3.96	Sangat Baik (A)
5	Tidak ada percatoan/perantara tidak resmi pada unit pelayanan ini	3.96	Sangat Baik (A)

Showing 1 to 5 of 5 entries